**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahan salah satu upaya meningkatkan kualitas Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa perlu memberikan pedoman mengenai penyusunan standarisasi bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 155,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41).
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu.
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- d. Badan Perwakilan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-Pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan penetapan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- g. Teknik penyusunan adalah cara menyusun rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa mulai penanaman sampai dengan penutup.
- h. Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB II KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 2

Kerangka Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri atas :

- a. Judul.
- b. Pembukuan, terdiri dari :
 - Jabatan Pembentukan Peraturan Desa.
 - Konsideran (menimbang).
 - Dasar hukum (mengingat).
 - Memutuskan.
 - Menetapkan.
 - Nama Peraturan Desa.
- c. Batang tubuh dirumuskan dalam bentuk pasal – pasal dan ayat – ayat dikelompokan dalam :
 - Ketetapan umum.
 - Materi pokok yang diatur.
 - Ketentuan peralihan (jika diperlukan).
 - Ketentuan penutup.
- d. Penutup.
- e. Penjelasan jika diperlukan.
- f. Lampiran jika diperlukan.

Pasal 3

Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Bentuk Peraturan Desa Serta Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Desa.

BAB III MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Peraturan Desa dibentuk untuk menetapkan materi-materi :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- b. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Desa.
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan Desa.
- d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan Desa.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

Peraturan Desa sebelum ditetapkan agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai situasi dan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga diajukan oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pemerintah Desa atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.
- (5) Setelah menerima peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepada Desa tentang hal yang berhubungan dengan materi rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 maka BPD membahas rancangan Peraturan Desa tersebut bersama – sama pemerintah Desa.
- (7) Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (8) Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (9) Rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dapat mengundang pejabat.